

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap sektor sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 telah dituangkan 5 (lima) agenda pembangunan dan dijabarkan kedalam 13 (tiga belas) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Dari 13 prioritas pembangunan tersebut di atas dirumuskan pula fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan SKPD yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya dari fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, ditetapkan tema pembangunan yang menjadi benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat juga dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

Adapun metodologi penyusunan prioritas dengan memperhatikan kriteria antara lain:

1. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan
2. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas program pembangunan
3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama untuk mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasi, dan memberikan kemudahan agar pembangunan yang dilakukan dapat berkembang
4. Realistis untuk dilaksanakan

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, maka tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
Visi : Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Bertaqwa, Sehat, Edukatif dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Maju Dan Modern			
1	Misi : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan	1) Meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal 2) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dengan memfasilitasi sarana dan prasarana keagamaan
2	Menyelenggarakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (<i>Good Local Governance and Clean Government</i>)	a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih	1) Meningkatnya kualitas disiplin dan kesejahteraan aparatur; 2) Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah; 3) Terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
		b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintah daerah	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pemerintah daerah.
		c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pembangunan;	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel
		d. Terjaminnya hak masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
3	Mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah	a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas lembaga adat dan budaya	1) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya; 2) Meningkatnya kualitas kelembagaan adat dan budaya
		b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebudayaan	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana kebudayaan

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
4	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan	a. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan	1) Terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah; 2) Terlaksananya manajemen sekolah yang profesional
		b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	1) Tersedianya prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang sesuai standar; 2) Meningkatkan pelaksanaan program RSBI.
		c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pendidikan	Meningkatnya kompetensi guru.
		d. Meningkatkan kualitas pendidikan khususnya melalui bidang pusdokinfo (perpustakaan, dokumentasi dan informasi)	Meningkatnya minat baca masyarakat dan terbinanya perpustakaan
		e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu di kawasan Sumatera Bagian Tengah; 2) Tersedianya prasarana dan sarana penunjang kesehatan; 3) Terlaksananya manajemen kesehatan yang profesional.
5	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial	1) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pekerja sosial; 2) Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga sosial; 3) Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial; 4) Menurunnya angka kemiskinan
6	Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olah raga;	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana olah raga yang representatif
		b. Meningkatkan kompetensi kelembagaan pemuda dan olah raga.	1) Meningkatkan kompetensi kelembagaan pemuda; 2) Meningkatkan prestasi olahraga.
7	Meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan dan jasa;	Tersedianya prasarana dan sarana perdagangan dan jasa yang representatif

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
		b. Meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk IKM dan UKM;	1) Meningkatnya kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industri kecil/rumah tangga; 2) Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan ekonomi daerah
		c. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata daerah;	Meningkatnya daya tarik obyek wisata
		d. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif;	Terciptanya lingkungan tempat usaha yang aman dan nyaman.
		e. Mengembangkan usaha pertanian yang berwawasan agribisnis.	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian
8	Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum	a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang daerah;	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten
		b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kota;	1) Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur kota; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih; 3) Meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan permukiman; 4) Meningkatnya pengelolaan sanitasi kota (persampahan, air limbah dan drainase); 5) Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi.
		c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
9	Meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat	a. Meningkatkan kapasitas lembaga sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan	1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan; 2) Tersedianya fasilitas permodalan bagi usaha mikro kelurahan dan lembaga keuangan mikro yang berbasis masjid; 3) Berkembangnya lembaga keuangan mikro yang berbasis mesjid; 4) Meningkatnya pelayanan lembaga amil zakat.

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
		b. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan;	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya.
		c. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	Meningkatnya keterampilan dan produktifitas tenaga kerja dalam pasar kerja.
10	Menegakkan peraturan daerah yang berkeadilan	a. Mewujudkan supremasi hukum di tengah masyarakat.	1) Meningkatkan penegakan peraturan daerah; 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pelayanan dan pengaturan masyarakat.

4.2 Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 ada sebanyak 13 (tiga belas) prioritas pembangunan. Setiap tahun anggaran perlu diperjelas titik berat yang akan dilaksanakan atau kita sebut Fokus Prioritas Pembangunan yang bertitik tolak dari identifikasi masalah yang ada setiap tahunnya.

Gambaran keterkaitan antara program prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2014 disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2010-2015	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2014
1.	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah
2.	Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan	Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan
3.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
4.	Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan
5.	Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran	Peningkatan daya saing produk UMKM dan fasilitas pendukung produksi dan pemasaran

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2010-2015	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2014
6.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi
7.	Peningkatan pelayanan infrastruktur kota	Peningkatan pelayanan infrastruktur kota
8.	Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih	Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih
9.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata
10.	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup
11.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
12.	Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga	Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga
13.	Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat	Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat

Prioritas Pembangunan Kota Solok Tahun 2014 tetap melaksanakan 13 prioritas yang ada dengan fokus sebagai berikut:

Tabel 4.3 Fokus Prioritas Pembangunan Tahun 2014

Bidang Sosial Budaya

NO	PRIORITAS	MASALAH	FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
1	I. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan serta Peningkatan Kualitas Nilai-nilai Adat dan Kebudayaan Daerah	1. Belum jelasnya lembaga yang berkompeten dalam melakukan sertifikasi guru TPA/MDA 2. Masih Minimnya sarana dan prasarana TPA/MDA 3. Kurang menariknya materi yang disampaikan pada pelaksanaan MABIT 4. Masih adanya Masjid/Mushala yang sepi dari jemaah 5. Masih rendahnya peran tokoh adat/budaya atau kelembagaan dalam pengembangan nilai-nilai adat dan budaya. 6. Masih kurang penguatan kelembagaan adat dan budaya 7. Masih belum optimalnya penggalan nilai-nilai adat dan budaya 8. Kurang terpeliharanya dan tersosialisasinya situs budaya dan cagar budaya yang dilindungi 9. Terbatasnya generasi muda yang terampil dengan pidato adat	- Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan masyarakat (MABIT, Peningkatan sarana TPA/MDA, Pembentukan lembaga sertifikasi guru TPA/MDA) - Peningkatan nilai-nilai adat dan budaya (Penguatan kelembagaan Adat dan Budaya, Peran Tokoh adat dan Penggalan nilai-nilai adat dan budaya)

NO	PRIORITAS	MASALAH	FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
2	II. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pendidikan dan keterampilan tenaga pendidik berbasis kompetensi dan metode pembelajaran. 2. Masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang belum sesuai standar 3. Belum konsistennya pelaksanaan rayonisasi Penerimaan Siswa Baru (PSB) 4. Masih rendahnya minat baca masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi tenaga pendidik (pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi) - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar - Peningkatan minat baca masyarakat (optimalisasi operasional pustaka keliling)
3	III. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat 2. Masih rendahnya pemahaman medis dan masyarakat terhadap penanganan kesehatan 3. Masih tingginya angka kelahiran penduduk (3,53%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemahaman masyarakat (sosialisasi pola hidup bersih dan sehat) - Peningkatan pemahaman medis dalam penanganan kesehatan. - Optimalisasi program KB (akseptor KB Pria)
4	IV. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya komitmen penggunaan basis data kemiskinan (PPLS) 2. Masih lemahnya kualitas SDM Keluarga Miskin dalam pemberdayaan ekonomi 3. Kecilnya Indeks perbaikan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan basis data kemiskinan yang akurat - Pendampingan Keluarga Miskin dalam pemberdayaan ekonomi (Pembinaan dan Pelatihan KUBE, Penguatan Modal dan BMT) - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Penambahan Indeks Biaya perbaikan)
5	VI. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya regulasi daerah dalam mengatur kedisiplinan pegawai 2. Masih rendahnya penegakan peraturan kepegawaian melalui reward and punishment 3. Belum terisinya jabatan fungsional di SKPD 4. Masih terbatasnya SDM pengelola arsip yang terampil di SKPD 5. Masih terbatasnya prasarana penyimpan arsip 6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap usulan perencanaan yang disampaikan ke tingkat kota 7. Masih terbatasnya ketersediaan data yang akurat 8. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan disiplin aparatur (pembuatan regulasi, pemberian <i>reward and punishment</i>) - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip - Peningkatan pemahaman masyarakat dalam perencanaan pembangunan (pertemuan berkala dengan fasilitator perencanaan di tingkat kelurahan dan kecamatan)

NO	PRIORITAS	MASALAH	FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
6	IX. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olah Raga	1. Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga 2. Masih rendah tingkat prestasi olah raga yang diraih	- Peningkatan sarana dan prasarana olah raga (penyediaan lahan, Pembangunan GOR) - Peningkatan reward bagi Atlit berprestasi
7	XI. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah 2. Pengelolaan asset daerah belum optimal (inventarisasi dan penatausahaan) 3. Kapasitas jaringan untuk mendukung kelancaran SIPKD masih rendah 4. Modul perencanaan dan pertanggungjawaban dalam SIPKD belum terlaksana. 5. Kemampuan SDM operator SIPKD di bidang perencanaan masih terbatas 6. Belum maksimalnya ketersediaan data potensi pendapatan	- Peningkatan Pengelolaan penataan Asset Daerah - Peningkatan implementasi SIPKD (peningkatan kapasitas jaringan, modul perencanaan, SDM Operator)
8	XIII. Peningkatan Kualitas Kesadaran Hukum Masyarakat	1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum 2. Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan dan penegakan produk hukum 3. Masih banyaknya terjadi pelanggaran Perda	- Peningkatan Sosialisasi produk hukum kepada masyarakat (Penyuluhan Hukum, Optimalisasi JDIH) - Peningkatan pengawasan dan penegakan produk hukum

Bidang Ekonomi

NO	PRIORITAS	MASALAH	FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
1	V. Peningkatan Daya Saing Produk UMKM dan Fasilitas Pendukung Produksi dan Pemasaran	1. Belum optimalnya pendampingan yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan UKMK 2. Kualitas produk yang dihasilkan kalah bersaing 3. Masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk menyediakan produk partai besar 4. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan sebahagian UKM 5. Belum optimalnya pemanfaatan TI oleh UKMK	- Peningkatan daya saing produk UKM dan fasilitas pendukungnya (pendampingan penggunaan teknologi, jaringan pemasaran, manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi. - Optimalisasi pasar pagi sebagai penunjang Pasar Raya Solok - Pembangunan Pasar di samping Terminal Bareh Solok - Optimalisasi pemanfaatan lokasi PT. KAI sebagai

NO	PRIORITAS	MASALAH	FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
		dan SKPD 6. Belum optimalnya jaringan pelaku ekonomi 7. Perdagangan masih terpusat di kawasan pasar raya dan sebagian besar masih bersifat retail 8. Belum tertatanya bangunan di kawasan pasar raya 9. Belum tertatanya penempatan pedagang sesuai dengan peruntukan 10. Masih banyak pencari kerja yang belum tersalurkan di pasar kerja 11. Masih rendahnya kemampuan dan kemandirian kelembagaan tani 12. Areal pertanian cenderung semakin berkurang 13. Rumah Potong Hewan yang baru masih belum bisa difungsikan karena keterbatasan prasarana dan sarana pendukung	prasarana perdagangan - Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan RPH (rumah penjaga, jalan keliling RPH, pagar keliling RPH, air dan listrik)
2	XII. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Pariwisata	1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang objek wisata, khususnya di kawasan wisata Pulau Belibis 2. Belum berkembangnya industri dan jasa kepariwisataan	- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana wisata Pulau Belibis (pembangunan kolam renang, cottage, pagar keliling) - Peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha wisata

Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah

NO	PRIORITAS	MASALAH	FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
1	VII. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Kota	1. Masih terdapat 94,49 km jalan dalam kondisi tidak baik 2. Beberapa ruas jalan tidak bisa menampung volume kendaraan (Pelebaran Jalan Dt. Parpatih Nan Sabatang sampai by pass) 3. Belum selesainya pembangunan Jalan Lingkar	- Peningkatan pelayanan infrastruktur jalan (Pelebaran Jalan Dt. Parpatih Nan Sabatang sampai By pass, lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara, pembenahan dan pembangunan jalur pejalan kaki/pedestrian,

NO	PRIORITAS	MASALAH	FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
		<p>Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum memadainya jalur pejalan kaki/pedestrian Terbatasnya sumber air untuk memenuhi kebutuhan irigasi Terbatasnya lahan untuk pembangunan infrastruktur kota Di beberapa lokasi terbatas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan permukiman yang memadai Masih terbatasnya permukiman yang tertata Masih kurangnya tenaga BPK dan relawan yang terampil Masih kurangnya ketersediaan sarana pencegahan bahaya kebakaran Belum seluruhnya angkutan umum memiliki izin trayek Masih terbatasnya ketersediaan prasarana perhubungan Belum tersedianya terminal truk Belum optimalnya fungsi terminal regional bareh solok Masih terbatasnya rambu-rambu lalu lintas 	<p>optimalisasi fungsi Terminal Bareh Solok, penyediaan lahan terminal truk)</p>
2	VIII.Peningkatan Pengelolaan Sanitasi dan Air Bersih	<ol style="list-style-type: none"> Masih banyak terdapat tangki septik masyarakat yang tidak sesuai dengan standar Belum tersedianya sistem air limbah skala komunitas kota Masih tercampurnya saluran air limbah dengan drainase kota Sistem drainase kota belum memadai Belum memasyarakatnya pengelolaan sampah pola 3R Terbatasnya prasarana dan sarana pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketersediaan sumber air baku - Pembenahan drainase kota - Peningkatan penerapan pengelolaan sampah pola 3R

NO	PRIORITAS	MASALAH	FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3	4
		<p>persampahan</p> <p>7. Belum jelasnya pengelola TPA regional</p> <p>8. Sistem pengolahan sampah masih <i>Control Landfill</i> (belum sesuai ketentuan)</p> <p>9. Terbatasnya ketersediaan air baku</p> <p>10. Belum meratanya kuantitas distribusi air bersih ke rumah penduduk</p> <p>11. Masih rendahnya kualitas air bersih di sebahagian permukiman</p>	
3	X. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	<p>1. Masih banyaknya terdapat daerah yang rawan pengikisan tebing sungai</p> <p>2. Masih terbatasnya RTH sesuai perundang-undangan</p> <p>3. Masih rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan</p> <p>4. Belum memadainya sistem pengolahan air limbah industri</p> <p>5. Masih terbatasnya regulasi di bidang penataan ruang</p>	<p>- Pengamanan tebing sungai</p> <p>- Peningkatan luasan RTH</p> <p>- Peningkatan ketersediaan regulasi di bidang penataan ruang</p>

Berdasarkan fokus prioritas tahun 2013 tersebut di atas, maka ditetapkan tema Pembangunan yaitu “ ***Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Masyarakat***”

Adapun sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Solok

No	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi		Prioritas Kota Solok
1	Reformasi birokrasi dan tata kelola	2	Pelaksanaan Reformasi birokrasi dalam Pemerintahan	6	Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah dan Reformasi Birokrasi
				11	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2	Pendidikan	3	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1	Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu Pendidikan
3	Kesehatan	4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Peningkatan Kaulitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4	Penanggulangan Kemiskinan	8	Penurunan Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, dan Daerah Tertinggal	4	Peningkatan kesejahteraan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5	Ketahanan pangan	5	Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan		
6	Infrastruktur	9	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat	7	Peningkatan pelayanan Infrastruktur Kota
				8	Peningkatan pengelolaan sanitasi dan Air Bersih
7	Iklim investasi dan iklim usaha	6	Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, UMKMK dan Iklim Investasi.	5	Peningkatan daya saing produk UMKM & fasilitas pendukung produksi & pemasaran
8	Energi		-		-
9	Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana	10	Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.	10	Peningkatan koordinasi Penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup
10	Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	8	Penurunan Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, dan Daerah Tertinggal.		-
11	Kebudayaan, kretifitas, dan inovasi teknologi	7	Pengembangan Wisata Alam dan Budaya	1	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah
12	Bidang politik, hukum dan keamanan		-	13	Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat
13	Bidang perekonomian				

No	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi		Prioritas Kota Solok
13	Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1	Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.	1	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah, program dan indikator kerjanya serta target capaian tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Prioritas Pembangunan Daerah, Program Dan Indikator Kinerjanya Serta Target Capaian Tahun 2014

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah	Pendidikan Non formal	- Persentase guru MDA/TPA yang bersertifikasi	80	Bag.Kesra Dinas Pendidikan
			- Persentase siswa SLTP dan SLTA yg mengikuti kegiatan mabit	95	
			- Persentase MDA yang melaksanakan didikan subuh	90	
			- Persentase jemaah mesjid	44	
1	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah	Pendidikan Non formal	- Jumlah lembaga agama yang dibina	5	Bag.Kesra Dinas Pendidikan
			- Persentase kegiatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan	100	
			- % rumah ibadah yang dibantu		
			➢ Mesjid	55	
			➢ Mushalla	55	
1	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta Peningkatan kualitas nilai-nilai adat dan kebudayaan daerah	Pengembangan Nilai Budaya	- Jumlah dokumen pelestarian nilai-nilai adat dan budaya	3	DPORKP
		Pengembangan Nilai Budaya	- Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	
		Pengelolaan Keberagaman budaya	- Jumlah benda, situs budaya dan benda cagar budaya yang dilindungi	10	DPORKP
2	Peningkatan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan	Manajemen Pelayanan Pendidikan	- Persentase panggung pidato adat yang aktif	100	
			- Angka Partisipasi Kasar (APK)		Dinas Pendidikan
			1. SD/MI/SDLB/Paket A	125	
			2. SMP/MTs/SMPLB/Paket B	118	
			3. SMA/ SMK/MA/SMALB/Paket C	135	
			- Angka Partisipasi Murni (APM)		
			1. SD/MI/SDLB/Paket A	98,5	
			2. SMP/MTs/SMPLB/Paket B	85	
			3. SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	80	
			- Angka kelulusan UN		
			1. SD/MI	94	
			2. SLTP/MTs	120	
			3. SLTA/MA	90	
			- Angka melek huruf	99,05	

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Peningkatan Mutu Pendidik Dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kepala sekolah yang mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan - Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/DIV <ul style="list-style-type: none"> 1. SD 70 2. SLTP 95 3. SLTA 98 - Sertifikasi Guru (Pemerintah Pusat) <ul style="list-style-type: none"> 1. SD/SLTP 90 2. SLTA 75 - Rasio guru per murid <ul style="list-style-type: none"> 1. SD 1:15 2. SLTP 1:12 3. SLTA 1:10 		Dinas Pendidikan
		Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pendirian boarding school 10 - Jumlah sekolah yang melaksanakan RSBI <ul style="list-style-type: none"> 1. SD 2,5 2. SLTP 30 3. SLTA 50 - Rasio Sekolah per siswa <ul style="list-style-type: none"> 1. SD 191 2. SLTP 563 3. SLTA 500 - Rasio siswa per ruang kelas <ul style="list-style-type: none"> 1. SD 26 2. SLTP 32 3. SLTA 32 4. SMK 36 - Angka Rata-rata lama sekolah <ul style="list-style-type: none"> 1. SD 6,01 2. SLTP 3,01 3. SLTA 3,01 		Dinas Pendidikan
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jumlah kunjungan ke Perpustakaan umum 80 - Persentase pemenuhan kebutuhan buku/bacaan di perpustakaan 35 		Kantor Arsip, dokumentasi dan Perpustakaan
3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 118 - Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup 23 - Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 80 - Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 - Cakupan ibu nifas 90 - Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 80 - Cakupan neonatal dengan 80 		Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			kompileasi yang ditangani - Cakupan kunjungan bayi	80	
		Perbaikan gizi Masyarakat	- Presentase balita gizi kurang - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan - Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	16 100 100	Dinas Kesehatan Badan KBPMP
		Peningkatan kesehatan lansia	- Cakupan pelayanan kesehatan lansia	73	Dinas Kesehatan Badan KBPMP
		Pencegahan Penanggulangan penyakit menular	- Umur Harapan Hidup - Cakupan penemuan BTA+ - Penemuan kasus AFP per 1000 penduduk - Penderita DBD ditangani - Penemuan penderita diare - Penemuan penderita pneumonia balita - Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 jam	69,94 80 ≥2 100 90 90 100	Dinas Kesehatan
		Obat dan Perbekalan Kesehatan	- Persentase ketersediaan obat generik	95	Dinas Kesehatan
		Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase masyarakat yg mempunyai jaminan kesehatan - Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) - Cakupan air minum yang memenuhi syarat kesehatan - Akses Jamban sehat - Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes	100 100 84 89 95 92 93	Dinas Kesehatan
		Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat	74	Dinas Kesehatan
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	- Cakupan desa siaga aktif - Cakupan desa UCI - Cakupan pelayanan anak balita - Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin - Persentase kunjungan masyarakat ke Puskesmas (kunjungan baru) - Rasio Pustu per satuan	100 92 80 100 1,8 3,929	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			penduduk - Rasio Poliklinik per satuan penduduk - Rasio Posyandu per satuan balita	22,252 80,292	
		Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	- Jumlah pusat pelayanan spesifik Traumatic Centre	1	Dinas Kesehatan
		Keluarga Berencana	- Persentase menurunnya angka kelahiran - Persentase menurunnya unmet need - Cakupan peserta KB aktif - Laju pertumbuhan penduduk	3,46 11,51 71 1,05	BKBMP
4	Peningkatan kesejahteraan sosial dan Penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	- Jumlah sarana sosial (panti asuhan, rumah singgah, panti jompo)	2	Dinas Sosnaker
		Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	- Persentase ex penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina dan mandiri	20	Dinas Sosnaker
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Persentase angka kemiskinan (KK miskin)	6,72	Dinas Sosnaker Badan KBPMP SKPD lainnya
		Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	- Persentase organisasi perempuan yang mempunyai usaha produktif	25	Badan KBPM
		Peningkatan Kesempatan Kerja	- Jumlah pencari kerja yang tersalurkan di pasar kerja	55	Dinas KPST
		Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	- Jumlah BMT - Jumlah Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) - % pemberi zakat (Muzzaki) - % penerima zakat (Mustahik) - Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang mendapatkan	42 3 43 46 95	BKBMP

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			pinjaman modal dari BUMN/BUMD		
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	- Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	15	BKBMP
5	Peningkatan daya saing produk UMKM & fasilitas pendukung produksi & pemasaran	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	- Pertumbuhan omset UMKM - Pertumbuhan modal koperasi - Jumlah BPR/LKM - Pertumbuhan SHU koperasi	30 26 12 30	Dinas Koperindag
		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	- Persentase koperasi aktif	86	Dinas Koperindag
		Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	- Rata-rata pertumbuhan penanaman modal - Ketepatan waktu prosedur penanaman modal	10 5	Bag. Perekonomian
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Pertumbuhan omzet IKM - Persentase produk IKM yang mempunyai SPP-IRT	10 51	Dinas Koperindag
		Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	- Jumlah penyelesaian kasus perlindungan konsumen	90	Dinas Koperindag
		Pengembangan industri kecil dan menengah	- Persentase IKM yang produknya masuk ke pasar regional	18	Dinas Koperindag
		Peningkatan sarana dan prasarana Perdagangan	- Ketersediaan prasarana pasar grosir - Persentase kondisi fisik bangunan Ps. Raya	1 55	Dinas Koperindag Dinas PU
		Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	- Ketersediaan lokasi PKL - Cakupan bina kelompok pedagang	50 90	Dinas Koperindag Kantor Pengelola Pasar
		Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	- Tingkat pemanfaatan TI	9	Dinas Koperindag

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Peningkatan Kesejahteraan petani	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendapatan petani <ul style="list-style-type: none"> • Padi: Rp. 19,950 juta/ha/Tahun • Perkebunan: Rp.18,500juta/ha/Tahun • Ternak: Rp.20,750juta/tahun • Perikanan: Rp.19,200 juta/Tahun - Tingkat cakupan bina kelompok tani - Tingkat kemampuan dan kemandirian kelembagaan tani 	24.500 25.400 24.250 27.100 100 41	Dinas Pertanian, PK
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	- Tingkat pemenuhan kebutuhan pasar terhadap hasil produksi pertanian/Perkebunan	36	Dinas Pertanian, PK
		Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Padi = Ton/Ha GKG • Jagung = Ton Tongkol/Ha - Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi pertanian/ perkebunan 	6,64 9,72 80	Dinas Pertanian, PK
		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan angka prevalansi penyakit dan kematian ternak - Tingkat populasi ternak sapi - Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi peternakan 	4 5.067 70	Dinas Pertanian, PK
		Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat ketersediaan bahan pangan utama <ul style="list-style-type: none"> • Padi (Kg/perkapita) - Tingkat skor pola pangan harapan 	330,54 91,04	Dinas Pertanian, PK Kantor Kthn Pangan
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pelanggaran peredaran hasil hutan - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam\ mengantisipasi kebakaran hutan 	84 65	Dinas Pertanian, PK
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi hutan & lahan kritis - Kerusakan kawasan hutan - Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan kota 	68,17 28,39 5000btg	Dinas Pertanian, PK

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Pengembangan Budidaya Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi ikan - Tingkat produksi hasil komoditas perikanan - Tingkat pemenuhan kebutuhan pasar terhadap hasil produksi perikanan 	45,6 71,24 21,08	Kantor Kthn Pangan
6	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio aparatur S1 per jumlah aparatur - Rasio aparatur S2 per jumlah aparatur - Persentase pelanggaran disiplin pegawai - Persentase pegawai sesuai formasi di masing-masing SKPD 	62 9 20 85	BKD
		Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jabatan struktural sesuai kompetensi - Persentase jabatan fungsional sesuai kompetensi - Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat penjenjangan 	78 88 23	BKD
		Peningkatan profesionalisme pemeriksa dan aparatur pengawas	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio tenaga pengawas yang bersertifikasi auditor 	90	Inspektorat
		Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengelolaan arsip secara baku - Persentase pengelola arsip yang terampil 	42 95	Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan
		Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase akuntabilitas penyimpanan dokumen arsip daerah - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip 	70 71	Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio PAD dengan pendapatan daerah - Persentase akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah - Persentase Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah - Persentase penerapan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah - Tingkat ketersediaan data 	7,52 95 95 WDP 90 100	DPPKA

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			pendapatan		
		Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan - Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD - Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan - Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan 	100 77 85 93	BAPPEDA Setda
		Pengembangan data/informasi/statistik daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan data - Persentase akurasi data 	84 75	BAPPEDA
		Penataan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk - Ratio bayi ber akte kelahiran - Ratio pasangan ber akte nikah 	94 70 70	Dinas KPST
		Peningkatan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyelesaian pengajuan perizinan tepat waktu - Tingkat kepuasan masyarakat - Persentase jenis perizinan yang memiliki SOP 	85 85 100	KPP
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan 	92	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tindak lanjut hasil temuan - Jumlah temuan pemeriksaan - Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah 	82 175 0,17	Inspektorat
		Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat 	95	KPP
		Peningkatan prasarana dan sarana gedung kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan gedung kantor pemerintah daerah 	97	PU
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan jaringan informasi berbasis IT oleh SKPD 	91	Bag. Humas

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Pemberdayaan masyarakat	- Rasio swadaya masyarakat terhadap stimulan pemerintah	88	BKBMP
7	Peningkatan pelayanan infrastruktur kota	Pembangunan jalan dan jembatan	- Persentase panjang jalan kondisi baik - Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase - Rasio drainase dalam kondisi baik	60 52,50 87	Dinas PU
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan	- Persentase ketersediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	81,18	Dinas PU
		Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	- Persentase ketersediaan air irigasi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	79,04	Dinas PU
		Penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	- Persentase penyediaan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial	70	Bag. Pemerintahan
		Pengembangan perumahan	- Persentase luas permukiman tertata - Persentase permukiman layak huni	15 72	Dinas PU
		Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	- Persentase tenaga BPK dan relawan yang terampil - Persentase ketersediaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran - Persentase ketersediaan sarana pencegahan bahaya kebakaran	70 85 85	BPBD
		Peningkatan pelayanan angkutan	- Persentase kendaraan yg telah diuji berkala - Rata-rata pelanggaran lalu lintas per 1000 penduduk - Rasio izin trayek	84 61 100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	- Persentase tingkat ketersediaan prasarana perhubungan - Jumlah terminal - persentase pemasangan rambu-rambu	78 3 95	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8	Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air bersih	Penyediaan dan pengelolaan air baku	- Persentase Penduduk berakses air bersih - Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	96,5 98	Dinas PU
		Lingkungan sehat	- Persentase ketersediaan sistem	60	Dinas PU

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		perumahan	air limbah setempat yang memadai - Persentase ketersediaan air limbah skala komunitas/kawasan kota - Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk - Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kota (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	50 70 50	
9	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Pengembangan Destinasi (daerah tujuan) Pariwisata	- Persentase Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata	40	DPORKP
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisata	15	DPORKP
10	Peningkatan koordinasi penyelenggara an penataan ruang dan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	- Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup - Pencemaran status mutu air	60 60	KLH
		Pengendalian banjir	- Persentase Penanganan tebing sungai yang rawan pengikisan	70	KLH
		Pengelolaan ruang terbuka hijau	- Persentase RTH yang tersedia	30	KLH & DKTR
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	72	KLH
			- Persentase efektifitas kinerja IPAL UKM	84	
		Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	- Pengelolaan sampah pola 3R oleh masyarakat	11	DKTR
			- Persentase ketersediaan fasilitas pengurangan sampah perkotaan	12	
			- Persentase ketersediaan sistem penanganan sampah	75	
		Perencanaan tata ruang	- Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	70	DKTR
		Pemanfaatan ruang	- rasio bangunan yang memiliki Izin	48	DKTR
			- Jumlah regulasi yang disusun	5	

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
11	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Rasio PAD dengan pendapatan daerah	7,52	DPPKA
			- Persentase akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah	95	
			- Persentase Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	95	
			- Opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WDP	
			- Persentase penerapan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah	90	
			- Tingkat ketersediaan data pendapatan	100	
12	Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga	Peningkatan prasarana dan sarana olah raga	- Persentase ketersediaan kebutuhan prasarana dan sarana olahraga	75	DPORKP
		Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	- Jumlah atlit berprestasi	59	DPORKP
		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	- Jumlah organisasi kepemudaan yang punya kompetensi	24	DPORKP
13	Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	- Persentase kompetensi aparatur dibidang hukum	91	Bag. Hukum
			- Persentase penyempurnaan produk hukum	92	
			- Persentase penegakan Perda	69	
			- Persentase kinerja aparatur bidang hukum dalam memfasilitasi penyelesaian masalah hukum	92	
			- Tingkat kesadaran hukum masyarakat	70	
			- Tingkat partisipasi masyarakat di bidang hukum	69	
			- Tingkat produk hukum yang aspiratif	93	
			- Tingkat keserasian antara produk hukum dengan perundang-undangan yang lebih tinggi	92	
		Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	- Persentase pengurangan penyakit masyarakat	42	Kantor Satpol PP

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Pendidikan Politik Masyarakat	- Persentase partisipasi politik masyarakat	80	Kantor Kesbang pol
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Persentase gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	6	BPBD
			- Persentase partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	88	Kantor Satpol PP
			- Tingkat kesiapan penanggulangan bencana	70	